

Capacity Building SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit)

Salah satu stakeholders terpenting di Indonesia adalah petani kelapa sawit. Petani mengelola 36% perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan luasan rata-rata 2 ha/KK. Regulasi Pemerintah Indonesia menetapkan pengelolaan sawit oleh rakyat rata-rata dari 2 hingga 25 hektar (UU Perkebunan No 18 tahun 2004). Dalam skema kemitraan



mewajibkan perusahaan perkebunan besar menyisihkan untuk masyarakat dengan 20 % dari luas ijin usaha (permentan No 26 tahun 2007, pasal 11). Sehingga dapat dikatakan perkebunan rakyat tidak dapat dipisahkan dari suksesstori Indonesia sebagai Negara produsen nomor satu di Dunia saat ini.

Pengembangan perkebunan rakyat di Indonesia di lakukan dengan dua model yakni model schema melalui pelibatan perusahaan yang disebut inti-plasma dan perkebunan mandiri yang diinisiasi secara langsung oleh masyarakat. Melihat luasan perkebunan rakyat dari masing-masing model tersebut, petani mandiri memiliki luas 2.550.230 ha dan petani plasma 837.127 Ha. Terkait dengan penggunaan praktek terbaik dalam perkebunan tentunya tidaklah sama. Dari sisi budidayaperkebunan, petani plasma lebih baik karena ditopang oleh perusahaan inti. Namun tidak berarti, pengembangan perkebunan rakyat di Indonesia haruslah menggunakan model skema plasma yang saat ini dipaksakan pemerintah melalui program revitalisasi perkebunan (permentan No 33 tahun 2007) dengan pola satu manajemen perkebunan. Temuan SPKS sejak tahun 2006, masyarakat Indonesia

lebih ingin mengelola sumber daya alamnya dengan pengelolaan kebun secara mandiri. Ketersediaan bibit sawit dan ketersediaan lahan menjadi awal yang baik bagi petani mandiri. Sehingga tidak salah, jika perkebunan mandiri di Indonesia lebih luas ketimbang petani plasma.

Masalah Yang di hadapi Petani mandiri

1. Legalitas usaha pekebun

Petani mandiri di Indonesia mayoritas belum memiliki sertifikat kebun kelapa sawit. Rata-rata petani hanya memiliki surat keterangan tanah (SKT) yang diberikan kepala desa. Hal ini diakibatkan oleh pengurusan sertifikat kebun terlalu mahal sekitar 3 – 4 juta Rupiah. Proses birokrasi yang berbelit dan lama, turut mempengaruhi dalam mengurus sertifikat kebun petani.

2. Penggunaan bibit



Selain legalitas usaha petani, juga penggunaan bibit kelapa sawit yang tidak bersertifikat. Bibit kelapa sawit yang digunakan lebih banyak diperoleh dari penjual yang tidak jelas asal usul institusinya. Namun dapat dipahami, bahwa akibat lembaga pembibitan berpusat di Sumatra utara dan

kurangnya pembinaan dan inisiatif dari pemerintah daerah untuk mengembangkan system pembibitan didaerah. Banyak juga petani mandiri yang membeli kecambah dan kemudian di buat penyemaian sendiri.

3. Tidak berkelompok

Petani mandiri tidak sama dengan petani plasma yang berkelompok dan memiliki manajemen kelompok. Petani mandiri lebih bergerak individual atau tidak berkelompok seperti petani plasma. Hal ini dipengaruhi oleh tidak ada proses pengorganisasian petani dalam pembangunan kebun mandiri. Sementara petani plasma diorganisir oleh koperasi ataupun oleh perusahaan inti.

4. Luas dan kebun terpisah-pisah

Peraturan pemerintah Indonesia menegaskan bahwa batasan luas kebun milik petani adalah dibawah 25 ha. Luas kebun petani di beberapa wilayah Indonesia bervariasi antara satu sama dengan lainnya. Ada yang memiliki 1 ha dan pula yang lebih. Sementara letak kebun petani yang satu dengan yang lainpun terpisah-pisah atau tidak dalam satu hamparan.

5. Sistem Pemasaran hasil kelapa sawit

Dalam pemasaran hasil buah, petani mandiri selalu berhubungan dengan tengkulak. Jarang ditemui petani mandiri memasarkan hasil produksinya langsung dengan pabrik kelapa sawit. Dapat dipahami, factor bibit yang tidak jelas dan besaran produksi petani turut mempengaruhi dalam hal ini.



6. Infrastruktur pengangkutan

Kondisi jalan pengangkutan hasil produksi yang sangat buruk mempengaruhi proses pengangkutan buah. Jarak antara kebun dan pabrik yang sangat jauh memaksa jasa tengkulak lebih menguntungkan walaupun menentukan harga dibawah ketentuan pemerintah. Kekurangan juga jika modal dalam membangun insfrastruktur jalan

sangat berpengaruh. Selain itu pula, resiko yang timbul adalah terlambatnya proses pengangkutan buah sawit jika musim hujan. Terkadang satu minggu lebih, tandan sawit tersebut baru dapat diangkut. Tidak teraturnya jadwal panen dan kurangnya truk pengangkut sawit menjadi pelengkap masalah bagi petani mandiri.

Capacity Building yang telah di lakukan SPKS

No	Kurikulum Pelatihan	Tujuan	Intensitas
1	Pelatihan ToT Manajemen kebun kelapa sawit	Meningkatkan produktifitas kebun petani sawit melalui best practice	Telah Di lakukan di 7 Kabupaten di SPKS wilayah
2	Pelatihan ToT Fair kontrak	Mendorong perbaikan skim kemitraan agar lebih setara, adil dan saling menguntungkan	Telah di lakukan sebanyak 1 kali bagi kabupaten yang sedang melakukan replanting (menerapkan skim baru)
3	Pelatihan kepemimpinan	Memperbaiki keorganisasian petani sawit melalui system kepemimpinan yang lebih kuat	Telah di lakukan ToT satu kali dan di lakukan di 8 kabupaten (SPKS Wilayah)
4	Pelatihan ToT koperasi	Melatih system pengembangan koperasi dan mengetahui kiat-kiat merawat koperasi.	Telah di lakukan ToT satu kali di tingkat nasional dan telah membangun koperasi di dua kabupaten di Kalimantan barat.
5	Pelatihan ToT Manajemen organisasi	Mendorong perbaikan organisasi dengan memiliki manajemen organisasi yang akuntabel, transparan dan responsive	Telah Di lakukan ToT Satu kali di tingkat nasional dan akan di kembangkan di 8 kabupaten (spks wilayah)
6	Pelatihan Penilaian Tanaman	Meningkatkan pemahaman petani terkait best practice pembangunan perkebunan yang lebih baik. (menggunakan standar pembangunan kebun; panduan pemerintah tahun 2006)	Telah Dilakukan di 7 kabupaten (spks wilayah)

Pelatihan Manajemen Kebun Kelapa Sawit

No	Wilayah	Jumlah peserta	Pengembangan pelatihan	Materi Pelatihan	Tantangan dalam peningkatan produktifitas
1	SPKS Paser di Kalimantan Timur	28	Di lakukan pelatihan di 4 kecamatan	Menggunakan DVD film manajemen kebun kelapa sawit dan menggunakan pelatih yang berpengalaman. Dengan materi sebagai berikut;	Kelangkaan pupuk
2	SPKS Sanggau di Kalimantan Barat	21	Dilakukan pelatihan di 4 kelompok tani		Pupuk mahal
3	SPKS Sekadau di Kalimantan barat	56	Di lakukan pelatihan di 3 desa		Bibit kelapa sawit yang berkualitas
4	SPKS Sintang di Kalimantan Barat	30	Di lakukan pelatihan di 4 kecamatan		Alat dan jalan transportasi pengangkutan TBS
5	SPKS Tanjung Jabung barat di Jambi	28	Dilakukan pelatihan di 7 desa		Rotasi panen yang tidak teratur
6	SPKS Kuantan Singingi di Riau	24	Di lakukan pelatihan di 4 desa		Tidak memiliki kelompok untuk menata perbaikan sarana dan prasarana kebun
7	SPKS Labura di Sumatra Utara	31	Dilakukan pelatihan di 5 kecamatan		

Disediakan oleh:

Darto Mansuetus Asly Hanu

Koordinator, Serikat Petani Kelapa Sawit (Indonesia)